KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

8Y963Y6F

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

\\ KEMENTER	IAN KEUANGAN RI	H.1 NOMOR	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 6 4 1				H.4 X Final	
DIREKTORAT	JENDERAL PAJAK	H.2 X Pen	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 68 807 591 0 722 000								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : MISNAH ARTATI								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.1 B.2			B.4	B.5	B.6	B.7	
4 21-402-01		519.500		519.500	0	5	25.975	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 046/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022								
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 2 8 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy								
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor: Tanggal dd mm yyyy								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0								
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							ITIMUR	
C.3 ID Subunit Organisasi :							7	
C.4 Tanggal	2 8 dd	0 4 mm	2 0 2 2 yyyy			_		
C.5 Nama Penandatangan : HARI JUMADI								
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.							benar dan telah saya	
				j berlaku, Direktorat Jenderal Paja lukan tanda tangan.	k mengatur bahwa d	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	